



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PADA JABATAN ADMINISTRASI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pejabat dalam Jabatan Pelaksana pada Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Jabatan Pelaksana pada Jabatan Administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Jabatan Pelaksana pada Jabatan Administrasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
13. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PADA JABATAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tangerang.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi negara, jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan terdiri dari jabatan Struktural dan Fungsional.

3. Jabatan...

3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

BAB II
NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PADA JABATAN
ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal 2

- (1) Nama-nama Jabatan Pelaksana pada Jabatan Administrasi aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah kabupaten Tangerang ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI TANGERANG,
Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 110 TAHUN 2015
 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PADA
 JABATAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PADA JABATAN ADMINISTRASI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

No	Nama Jabatan Pelaksana pada Jabatan Administrasi
1	Administrasi Kearsipan
2	Administrasi Kepegawaian
3	Administrasi Keuangan
4	Administrasi Umum
5	Ajudan
6	Akuntan
7	Analisis Apresiasi Film
8	Analisis Apresiasi Karya Seni
9	Analisis Bahasa Dan Sastra
10	Analisis Bidang Pengawasan
11	Analisis Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
12	Analisis Data Dan Informasi
13	Analisis Desa / Kelurahan
14	Analisis Dokumentasi Kesenian Dan Perfilman
15	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya
16	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional
17	Analisis Evaluasi Dan Pelaporan
18	Analisis Hubungan Antarlembaga Kepercayaan
19	Analisis Informasi
20	Analisis Informasi Kebudayaan
21	Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
22	Analisis Informatika
23	Analisis Jabatan
24	Analisis Jalan
25	Analisis Jaringan Jalan
26	Analisis Kebutuhan Diklat
27	Analisis Kekayaan Budaya
28	Analisis Kelembagaan/Organisasi
29	Analisis Kerja Sama Kebudayaan
30	Analisis Kesehatan Ibu Dan Anak

31	Analisis Kesejahteraan Rakyat
32	Analisis Keselamatan Kerja
33	Analisis Kesenian Dan Budaya Daerah
34	Analisis Koleksi Museum
35	Analisis Konsultasi Dan Bantuan Hukum
36	Analisis Koperasi
37	Analisis Kreasi Dan Produksi Musik
38	Analisis Laboratorium
39	Analisis Nilai Budaya
40	Analisis Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
41	Analisis Pelaporan
42	Analisis Pelayanan Publik
43	Analisis Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
44	Analisis Pemanfaatan Teknologi
45	Analisis Pemberdayaan Masyarakat
46	Analisis Pemeliharaan Dan Pemugaran Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
47	Analisis Penanaman Modal
48	Analisis Penegakan Integritas Sdm Aparatur
49	Analisis Penetapan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
50	Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa
51	Analisis Pengamanan Objek Vital, Transportasi Dan VVIP
52	Analisis Pengaturan Dan Pengadaan Tanah
53	Analisis Pengawas
54	Analisis Pengembangan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
55	Analisis Pengembangan Sistem Informasi
56	Analisis Pengembangan Teknologi
57	Analisis Pengetahuan Tradisional
58	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian Dan Agrobisnis
59	Analisis Penyuluh Keluarga Berencana
60	Analisis Peraturan Administrasi
61	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
62	Analisis Perbendaharaan
63	Analisis Perdagangan
64	Analisis Perekonomian
65	Analisis Perencanaan Anggaran
66	Analisis Perfilman
67	Analisis Perhubungan Dan Telekomunikasi

68. Analisis Perijinan...

68	Analisis Perijinan
69	Analisis Perijinan Dan Pengamanan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
70	Analisis Pertanahan
71	Analisis Perumusan Standar Industri
72	Analisis Pestisida
73	Analisis Peta Wilayah
74	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial
75	Analisis Publikasi Kesenian Dan Perfilman
76	Analisis Sdm Aparatur
77	Analisis Sistem Informasi
78	Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan
79	Analisis Sosial Budaya
80	Analisis Standarisasi Dan Teknologi
81	Analisis Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup
82	Analisis Sumber Daya Manusia Kebudayaan
83	Analisis Tenaga Kerja
84	Analisis Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
85	Analisis Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
86	Analisis Warisan Budaya
87	Analisis Warisan Budaya Benda
88	Analisis Warisan Budaya Takbenda
89	Bendahara
90	Fasilitator Kewirausahaan
91	Juru Pelestari Cagar Budaya
92	Juru Pelihara Cagar Budaya
93	Kurator Koleksi Museum
94	Kurator Seni
95	Notulis Rapat
96	Operator Data Entry
97	Operator Komputer
98	Pemegang Buku
99	Pemelihara Barang
100	Pemelihara Gedung
101	Pemelihara Kebersihan Kantor
102	Pemelihara Kendaraan
103	Pemelihara Peralatan

104. Pemeliharaan...

104	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor
105	Pemeriksa Koperasi
106	Pemeriksa Pelayanan Kb
107	Pemeriksa Penanaman Modal
108	Penagih Retribusi
109	Penata Laporan Keuangan
110	Pengadministrasi Barang
111	Pengadministrasi Disiplin Pegawai
112	Pengadministrasi Izin Usaha
113	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata
114	Pengadministrasi Kearsipan
115	Pengadministrasi Kepegawaian
116	Pengadministrasi Kepemudaan
117	Pengadministrasi Kependudukan
118	Pengadministrasi Kesenian Dan Budaya Daerah
119	Pengadministrasi Keuangan
120	Pengadministrasi Pemerintahan
121	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan
122	Pengadministrasi Penerbitan Izin
123	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
124	Pengadministrasi Perijinan
125	Pengadministrasi Perpustakaan
126	Pengadministrasi Persuratan
127	Pengadministrasi Tugas Belajar/Ijin Belajar
128	Pengadministrasi Umum
129	Pengawas Bangunan
130	Pengawas Lalu Lintas Darat
131	Pengawas Pelabuhan
132	Pengawas Pelayanan Publik
133	Pengawas Pengamatan Dan Pencegahan Penyakit
134	Pengawas Terminal
135	Pengawas Traffic Light
136	Pengawas Transportasi
137	Pengelola Gaji

138. Pengelola Adat...

138	Pengelola Adat Dan Kesenian
139	Pengelola Administrasi Kepegawaian
140	Pengelola Apresiasi Film
141	Pengelola Arkeologi
142	Pengelola Arsip Dan Dokumentasi Hukum
143	Pengelola Aset Barang Milik Negara
144	Pengelola Bahan Perencanaan
145	Pengelola Bantuan Hukum
146	Pengelola Bantuan Kebudayaan
147	Pengelola Barang
148	Pengelola Barang Inventaris
149	Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi Dan Paten
150	Pengelola Bengkel Latih
151	Pengelola Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
152	Pengelola Data Apresiasi Film
153	Pengelola Data Arkeologi
154	Pengelola Data Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
155	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya
156	Pengelola Data Ekspresi Budaya Tradisional
157	Pengelola Data Informasi, Data, Laporan, Dan Pengaduan
158	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan
159	Pengelola Data Kekayaan Budaya
160	Pengelola Data Klasifikasi Nilai Budaya
161	Pengelola Data Lingkungan Budaya
162	Pengelola Data Nilai Budaya
163	Pengelola Data Pelaksanaan Program Dan Anggaran
164	Pengelola Data Pelaksanaan Program Sertifikasi Sdm Kebudayaan
165	Pengelola Data Pelindungan Situs Manusia Purba
166	Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
167	Pengelola Data Pemanfaatan Situs Manusia Purba
168	Pengelola Data Pemetaan Nilai Budaya
169	Pengelola Data Pemetaan Sejarah
170	Pengelola Data Penanaman Nilai Budaya
171	Pengelola Data Penelitian Dan Pengembangan Kebudayaan
172	Pengelola Data Pengemasan Nilai Budaya
173	Pengelola Data Pengembangan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
174	Pengelola Data Pengembangan Situs

175. Pengelola Data...

175	Pengelola Data Pengendalian Pertanahan
176	Pengelola Data Penulisan Nilai Budaya
176	Pengelola Data Penulisan Sejarah
178	Pengelola Data Perijinan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
179	Pengelola Data Perumusan Nilai Budaya
180	Pengelola Data Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
181	Pengelola Data Program Sertifikasi Sdm Kebudayaan
182	Pengelola Data Publikasi Sejarah
183	Pengelola Data Sarana Kursus Dan Pelatihan
184	Pengelola Data Sejarah
185	Pengelola Data Seni Pertunjukan Nontradisional
186	Pengelola Data Seni Pertunjukan Tradisional
187	Pengelola Data Sumber Sejarah
188	Pengelola Data Warisan Budaya Benda
189	Pengelola Data Warisan Budaya Takbenda
190	Pengelola Diklat
191	Pengelola Dokumen Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
192	Pengelola Dokumentasi Informasi Publik
193	Pengelola Eksplorasi Cagar Budaya
194	Pengelola Ekspresi Budaya Tradisional
195	Pengelola Evaluasi Dan Pelaporan
196	Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai
197	Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri
198	Pengelola Humas Dan Protokol (Vertikal)
199	Pengelola Imb Gedung/Bangunan
200	Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
201	Pengelola Instalasi Radio
202	Pengelola Jabatan Dan Kinerja Organisasi
203	Pengelola Jabatan Fungsional
204	Pengelola Kearsipan
205	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi
206	Pengelola Kegiatan
207	Pengelola Kekayaan Budaya
208	Pengelola Kepangkatan
209	Pengelola Kepemudaan
210	Pengelola Kesejahteraan

211. Pengelola Keuangan...

211	Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah
212	Pengelola Konservasi Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup
213	Pengelola Laboratorium
214	Pengelola Lingkungan Budaya
215	Pengelola Literasi Film
216	Pengelola Media Cetak
217	Pengelola Museum Dan Koleksi Benda Seni
218	Pengelola Nilai Budaya
219	Pengelola Pelaksanaan Program Kelembagaan Dan Kerja Sama
220	Pengelola Pelaporan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten
221	Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah
222	Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja
223	Pengelola Pelayanan Dan Desimenasi Informasi
224	Pengelola Pelayanan Hukum Sekretariat Daerah
225	Pengelola Pelayanan Kesehatan
226	Pengelola Pelayanan Kesehatan Hewan
227	Pengelola Pelayanan Medik Dan Rujukan
228	Pengelola Pelindungan Situs Manusia Purba
229	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
230	Pengelola Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
231	Pengelola Pemanfaatan Situs Manusia Purba
232	Pengelola Pembangunan Dan Peningkatan Jalan
233	Pengelola Pemeliharaan Dan Pemugaran Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
234	Pengelola Pemetaan Nilai Budaya
235	Pengelola Penanaman Nilai Budaya
236	Pengelola Penelitian Dan Pengembangan Kebudayaan
237	Pengelola Pengadaan Tanah
238	Pengelola Pengawasan Lalulintas Angkutan Jalan
239	Pengelola Pengemasan Nilai Budaya
240	Pengelola Pengembangan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
241	Pengelola Pengembangan Sarana Iptek
242	Pengelola Pengembangan Sdm
243	Pengelola Pengembangan Situs
244	Pengelola Pengendalian Pertanahan
245	Pengelola Pengetahuan Tradisional
246	Pengelola Penggunaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
247	Pengelola Penulisan Nilai Budaya

248. Pengelola Penulisan...

248	Pengelola Penulisan Sejarah
249	Pengelola Penyediaan Lowongan Kerja Dan Penempatan
250	Pengelola Penyehatan Lingkungan
251	Pengelola Penyelenggaraan Diklat
252	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik
253	Pengelola Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa
254	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan
255	Pengelola Penyimpan Barang
256	Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
257	Pengelola Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja
258	Pengelola Penyusunan Rencana Dan Program
259	Pengelola Perangkat Kecamatan
260	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan
261	Pengelola Perbendaharaan Dan Pelayanan
262	Pengelola Perbengkelan Dan Pengujian Kendaraan Bermotor
263	Pengelola Perencanaan Dan Kerjasama
264	Pengelola Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang
265	Pengelola Perencanaan Program
266	Pengelola Peningkatan Kompetensi
267	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan
268	Pengelola Perguruan Tinggi
269	Pengelola Perijinan Cagar Budaya Dan Koleksi Museum
270	Pengelola Perizinan
271	Pengelola Perjalanan Dinas
272	Pengelola Permodalan Koperasi Dan UMKM
273	Pengelola Perpustakaan
274	Pengelola Perumusan Nilai Budaya
275	Pengelola Program Penyuluhan
276	Pengelola Publikasi Sejarah
277	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas
278	Pengelola Retribusi Terminal
279	Pengelola Sampah
280	Pengelola Sarana Angkutan
281	Pengelola Sarana Dan Prasarana Pemakaman Umum
282	Pengelola Sarana Dan Prasarana Pendidikan

283. Pengelola Sarana...

283	Pengelola Sarana Dan Prasarana Taman
284	Pengelola Sarana Iptek
285	Pengelola Sejarah
286	Pengelola Seni Pertunjukan Nontradisional
287	Pengelola Seni Pertunjukan Tradisional
288	Pengelola Seni Rupa Murni
289	Pengelola Seni Rupa Terapan
290	Pengelola SIM Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu
291	Pengelola Sistem Dan Jaringan
292	Pengelola Sistem Informasi
293	Pengelola Situs/Web
294	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah
295	Pengelola Sumber Sejarah
296	Pengelola Upacara Adat
297	Pengelola Warisan Budaya Benda
298	Pengelola Warisan Budaya Takbenda
297	Pengemudi
298	Pengkaji Pelestari Cagar Budaya
299	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya
300	Pengkaji Pelindungan Situs Manusia Purba
301	Pengkaji Pengembangan Situs Manusia Purba
302	Pengolah Daftar Gaji
303	Pengolah Data
304	Pengolah Data Apresiasi Film
305	Pengolah Data Arkeologi
306	Pengolah Data Warisan Budaya
307	Penyiap Bahan Rka-K/L
308	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya Dan Tradisi
309	Penyuluh Bencana
310	Penyuluh Hukum
311	Penyuluh Kemasyarakatan
312	Penyuluh Koperasi
313	Penyuluh Olah Raga
314	Penyusun Bahan Bantuan Hukum
315	Penyusun Bahan Kerjasama
316	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

317. Penyusun Data...

317	Penyusun Data Dan Informasi
318	Penyusun Dokumentasi Kesenian Dan Perfilman
319	Penyusun Dokumentasi Sejarah Dan Nilai Budaya
320	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan Diklat
321	Penyusun Perencanaan Program Dan Kegiatan
322	Penyusun Program Pembinaan Ekspresi Budaya Tradisional
323	Penyusun Program Pembinaan Komunitas Adat
324	Penyusun Program Pembinaan Lingkungan Budaya
325	Penyusun Program Pembinaan Pengetahuan Tradisional
326	Penyusun Program Pembinaan Seni Pertunjukan
327	Penyusun Program Pembinaan Seni Pertunjukan Nontradisional
328	Penyusun Program Pembinaan Seni Pertunjukan Tradisional
329	Penyusun Program Pembinaan Seni Rupa
330	Penyusun Program Pembinaan Seni Rupa Murni
331	Penyusun Program Pembinaan Seni Rupa Terapan
332	Penyusun Program Pembinaan Upacara Adat
333	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat
334	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi Sdm Kebudayaan
335	Penyusun Program Penulisan Sejarah Dan Nilai Budaya
336	Penyusun Publikasi Kesenian Dan Perfilman
337	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan
338	Penyusun Rekayasa Lalulintas
339	Penyusun Rencana Anggaran Dan Program
340	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri
341	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Kecil Mikro Dan Menengah
342	Penyusun Rencana Evaluasi Dan Pelaporan
343	Penyusun Rencana Hukum
344	Penyusun Rencana Program Dan Anggaran
345	Penyusun Risalah
346	Petugas Keamanan
347	Petugas Pembinaan Jasmani Dan Mental Pegawai
348	Petugas Penindakan
349	Petugas Protokol
350	Pranata Alat Persandian
351	Pranata Kearsipan

352. Pranata Linmas...

352	Pranata Linmas
353	Pranata Pemilu
354	Pranata Pengadaan Tanah
355	Pranata Tilang
356	Satlak Spi
357	Sekretaris
358	Teknisi Komputer
359	Teknisi Pelestarian Cagar Budaya
360	Teknisi Peralatan, Listrik Dan Elektronika
361	Verifikator Dokumen Perijinan
362	Verifikator Keuangan

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR